



RENCANA KERJA RSUD TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2024

**RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG**

Jalan Tidar No. 30A Magelang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh jajaran pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, serta untuk dapat bisa memacu kinerja, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja Rumah Sakit Umum daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna

bagi peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

Magelang, 15 Agustus 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang	20
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	26
BAB V PENUTUP	
	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	9
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2022	10
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang	11
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Magelang	17
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	20
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Magelang RSUD Tidar Kota Magelang	25
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024	38



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB 1 : PENDAHULUAN;
 - b. BAB 2 : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA;

- c. BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB 5 : PENUTUP.
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	124.594.403.028
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	379.706.807.972
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	49.652.640.264
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	30.665.050.387
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	13.176.933.364
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4.994.920.235
7	Dinas Sosial Kota Magelang	13.078.514.374
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	12.568.221.043
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	29.008.899.051
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6.099.023.047
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	10.656.407.263
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	15.165.774.718
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	12.670.328.007
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	5.553.360.737
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14.095.014.541
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.062.493.897
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.246.284.613
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	20.979.424.030
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	42.164.064.196
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	30.566.086.926

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	8.512.380.552
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	21.512.142.111
23	Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	12.708.550.977
24	Inspektorat Kota Magelang	7.331.204.990
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	22.922.070.539
26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	24.766.163.907
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	21.992.228.800
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	20.463.216.331
	TOTAL	983.912.609.900

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354
Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 66/SK/RSUDT/VIII/2023

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2008;
13. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
14. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
15. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Agustus 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja RSUD Tidar 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja RSUD Tidar Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan

tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi tahun lalu dan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja; pembahasan Rancangan Renja; perumusan Rancangan Akhir Renja; Verifikasi Rancangan Akhir Renja.

Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang untuk tahun ke tiga periode Renstra RSUD Tidar Kota Magelang 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024, Renstra RSUD Tidar Kota Magelang, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kesehatan yang berkaitan dengan RSUD Tidar Kota Magelang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- 2031;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangaunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
19. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Tidar Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra RSUD Tidar Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup RSUD Tidar Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh RSUD Tidar Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar tahun 2022 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Tidar Kota Magelang hanya ada 1(satu) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Dari hasil evaluasi, indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang diatas dapat mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar
4. Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
RSUD Tidar Kota Magelang

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Solusi yang dilakukan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas pelayanan 3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar 4. Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat	1. Lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, prasarana dan juga kualitas pelayanan 2. Promosi pelayanan RSUD Tidar ke seluruh lapisan masyarakat

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Ke giatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	02		Kesehatan									
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Percentase pelaksanaan Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja pada RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	81,11%	101,38%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84)	B (83,16)	99%	Sangat Tinggi

Pada tahun 2022 terdapat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja. Terdapat indikator kinerja tahun 2022 yang mengalami perubahan dari tahun 2021, yaitu Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Akses Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Kategori Sehat) menjadi Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Indikator tersebut tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan. Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Kesehatan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 (TWII)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rumah Sakit Kategori Sehat	A (65-80)	-	-	-	-	-	-	-	Indikator sudah tidak digunakan
2	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	-	80%	80 %	81 %	81,11% dengan capaian 101,38%	82,22% dengan capaian 102,77%	80%	81%	
3	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	78,53	B (84,00)	B (86,00)	B (87,00)	B (83,16) dengan capaian 99%	B (81,54) dengan capaian 94,81%	B(86,00)	B (87,00)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, RSUD Tidar Kota magelang menghadapi isu penting sebagai berikut :

a. Adanya Tuntutan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan juga terbukanya sarana informasi tentang kesehatan yang sangat luas, semakin tinggi pula pemahaman dan kesadaran akan hak-hak sebagai pasien, yang menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang ada di RSUD Tidar. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang cepat dan juga berkualitas.

b. Keadaan Persaingan dalam Industri Pelayanan Kesehatan

Persaingan dalam industri pelayanan kesehatan di Kota Magelang dan sekitarnya cukup ketat dengan peningkatan jumlah pesaing dan produk-produk layanan yang semakin bervariatif dan inovatif. Hal ini mendorong RSUD Tidar Kota Magelang untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu Rumah Sakit pesaing juga menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kesehatan pemerintah maupun swasta.

c. Adanya Pelayanan Kesehatan Prioritas Nasional

Dalam pelayanan kesehatan saat ini, Pemerintah telah menetapkan pelayanan kesehatan prioritas nasional yaitu pelayanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) serta pelayanan kesehatan prioritas lainnya. RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan daerah, yang menerima rujukan baik dari Kota Magelang maupun dari Kabupaten di sekitarnya harus dapat mendukung program pemerintah tersebut, dengan meningkatkan pelayanan baik dari sarana, prasarana, alat kesehatan dan juga sumber daya manusianya.

2.3.1 Pelayanan RSUD Tidar Kota magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang, RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, serta mempunyai fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada RSUD Tidar Kota Magelang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Beberapa permasalahan dan hambatan RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Kerjasama dalam tim (*team work*) belum maksimal. Dengan kerjasama tim yang solid akan berdampak pada kemajuan RSUD Tidar Kota Magelang.
2. Penerapan sistem manajemen informasi belum optimal. Sistem manajemen informasi yang berkualitas akan mendorong peningkatan pelayanan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu “**Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia**”. Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI I Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

- Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

RSUD Tidar Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan Kesehatan, menyelenggarakan urusan kesehatan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kota Magelang yaitu : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, RSUD Tidar Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan.
2. Masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan.
3. Keadaan Persaingan dalam pelayanan kesehatan, dengan adanya rumah sakit-rumah sakit swasta di Kota Magelang.
4. Cakupan pelayanan pasien BPJS yang menerapkan kebijakan rujukan berjenjang.
5. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Perkembangan teknologi informasi

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dapat menjadikan suatu peluang untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya era digital akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan.

2. Letak yang strategis

Lokasi RSUD Tidar yang berada di pusat kota, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap sarana pelayanan publik.

3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit

Sesuai dengan misi yang diemban rumah sakit serta tugas pokok dan fungsi rumah sakit maka sebagai rumah sakit daerah rujukan harus dapat mengembangkan cakupan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah sekitar rumah sakit harus disertai dengan peningkatan mutu, kemampuan dan jenis pelayanan yang lebih kompleks sehingga tetap dapat mempertahankan misinya sebagai rumah sakit rujukan.

4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu stake holder yang merupakan motor penggerak utama yang paling menentukan kinerja rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit akan berusaha meningkatkan komitmen berikut kualitas sumber daya manusia yang ada padanya.

5. Penerapan PPK BLUD mendorong pengelolaan rumah sakit secara efisien dan akuntabel serta adanya fleksibilitas pada batas-batas tertentu dalam hal pengadaan barang/jasa dan pengelolaan sumber daya manusia.

6. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain.

7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan
2. Pengembangan pelayanan kesehatan

3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan
4. Pemenuhan ketersediannya alat kedokteran, alat kesehatan dan sarana/prasarana
5. Penguatan kerjasama kelembagaan dan pelayanan rujukan
6. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD RSUD Tidar Kota Magelang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib RSUD Tidar terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Magelang

Nama Perangkat daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SUB UNIT RSUD TIDAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		
	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	245.000.000.000	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	245.000.000.000	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN			100%		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Tidar	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	15.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Tidar	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	15.000.000.000	
	Total				260.000.000.000					260.000.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah		Kota Magelang		
1	Penurunan stunting	Penurunan malnutrisi kronis	Peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan paripurna	
2	Penurunan wasting					
3	Penurunan kematian maternal			Penurunan angka kesakitan dan kematian		
4	Penurunan kematian bayi					
5	Pengendalian penyakit			Penurunan penyakit menular dan tidak menular		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan kesehatan masuk pada misi ke-2 yaitu, Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan tujuan dan sasaran RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Misi ke-2 Walikota dan Wakil Bupati Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
			4	5	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			7. Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
			8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		Rawat Jalan	1. Dokter memberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis
			2. Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
			3. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00
			4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
			5. Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %
			6. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. ≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b. ≤ 60 %
			1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3
			2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%
			3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
		Rawat Inap	4. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
			5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
			6. Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %
			7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%
			8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %
			9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
			10. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %
			11. Rawat Inap TB	
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	a. ≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. ≥ 60 %
		Bedah Sentral (bedah saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 har
			2. Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %
			3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
			4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%
			5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
			7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %
		Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %
			2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan
			3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih
			4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An
			5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%
			6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %
			7. Keluarga Berencana	100%
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	
			b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	
			8. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
		Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %
			2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
		Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
			2. pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad
			3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %
			4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
			2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
				4	
1	2	3			5
				3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%
				4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
			Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %
				2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
				3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
			Farmasi	1. waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit
				2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	2. 100 %
				3. Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %
				4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100 %
			Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥ 90 %
				2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. ≤ 20 %
				3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100 %
			Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	1. 100 % terpenuhi
				2. Kejadian Reaksi transfusi	2. ≤ 0,01 %
			Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
			Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100 %
				2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100 %
				3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit
				4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit
			Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
				2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100 %
			Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100 %
				2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100 %
				3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100 %
				4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4. 100 %
				5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %
				6. Cost recovery	6. ≥ 40 %
				7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100 %
				8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam
				9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3	4		5
1	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.		Ambulance /Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit 3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	1. 24 jam 2. ≤ 230menit 3. Sesuai ketentuan daerah
			Pemulasaran Jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam
			Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	≤ 80 % 100% 100%
			Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100% 100%
			Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %
				2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%
				3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care ssociated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat		B (84.00)

3.3 Program dan Kegiatan

RSUD Tidar Kota Magelang dalam mengimplmetisakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2024 sebanyak 2 program. Rincian program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
RSUD Tidar Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: RSUD Tidar Kota Magelang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%				100%	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD		100%				100%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase	RSUD Tidar	1 unit	245.000.000.000	BLUD		1 unit	210.000.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%				-	
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%				-	
1	02	02	201	0001	Pembangunan Rumah sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD Tidar	1 unit	15.000.000.000	DAU		-	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi RSUD Tidar Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2024 :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023 (Tahun n)							
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	SUB UNIT: RSUD TIDAR											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100%						
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD	100%		100%		100%		100%		100%					
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	50.000.000.000	1 unit	65.000.000.000	1 unit	65.000.000.000	1 unit	65.000.000.000	1 unit	245.000.000.000			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100%		100%		100%		100%		100%				
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	-	0	-	1 unit	15.000.000.000	0	-	1 unit	15.000.000.000			

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna di Kota Magelang.

Magelang, 15 Agustus 2023



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**
Kota Magelang
Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUB UNIT DINAS KESEHATAN											
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%			100%	
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100%	42.461.801	DAU	100%	57.281.000
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	3 dokumen	8.100.800	DAU	2 dokumen
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	2.530.400	DAU	1 dokumen
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	2.530.300	DAU	1 dokumen
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	3.084.600	DAU	1 dokumen
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	3.084.600	DAU	1 dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	5 laporan	23.131.101	DAU		5 dokumen	31.000.000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadministrasian keuangan	Dinas Kesehatan	100%	77.024.798.646	DAU		100%	78.066.000.000
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	779 orang	76.971.704.545	DAU		800 orang	78.000.000.000
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	12 laporan	53.094.101	DAU		12 laporan	66.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	100%	2.334.000	DAU		100%	2.500.000
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 laporan	2.334.000	DAU		1 laporan	2.500.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadministrasian kepegawaian	Dinas Kesehatan	100%	1.585.000	DAU		100%	1.600.000
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	1 dokumen	1.585.000	DAU		1 dokumen	1.600.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian umum dengan lancar	Dinas Kesehatan	100%	359.677.000	DAU		100%	365.000.000
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	4 paket	8.985.000	DAU		4 palet	9.000.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	4 paket	42.710.000	DAU		4 paket	43.000.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Dinas	6 paket	6.412.000	DAU		6 paket	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
					dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan	Kesehatan						
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 dokumen	7.200.000	DAU		12 dokumen 8.000.000	
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Kesehatan	11 paket	14.731.000	DAU		11 paket 15.000.000	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	1 laporan	2.536.000	DAU		1 laporan 3.000.000	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	261 laporan	277.103.000	DAU		261 laporan 280.000.000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kesehatan	100%	505.748.740	DAU		100% 505.000.000	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	1 laporan	4.593.400	DAU		1 laporan 5.000.000	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 laporan	283.317.840	DAU		12 laporan 290.000.000	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 laporan	217.837.500	DAU		12 laporan 210.000.000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah	Dinas Kesehatan	100%	642.139.000	DAU		100% 579.000.000	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan	5 unit	92.060.000	DAU		5 unit 93.000.000	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	45 unit	271.150.000	DAU		45 unit 290.000.000	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	66 unit	85.691.000	DAU		66 unit 86.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	4 unit	193.238.000	DAU		4 unit	110.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular		65%				67%	
						Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular		75%				77%	
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100%				100%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100%				100%	
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%				100%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%				100%	
						Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar		100%				100%	
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%				100%	
						Indeks Keluarga Sehat		0,8				0,8	
1	02	02	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%				100%	
						Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,30				0,30	
						Cakupan puskesmas		100%				100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
					Cakupan pembantu puskesmas		70%			70%			
					Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,05			0,05			
					Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		1			1			
					Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		100%			100%			
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Budi Rahayu	10 unit	1.831.755.500	DAU, DAK, DBHCHT	10 unit	7.000.000.000	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	6 paket	2.172.880.600	DAU, DBHCHT, DAK	6 paket	2.607.070.800	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%			100%		
						Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun		5%			5%		
						Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100%			100%		
						Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan		100%			100%		
						Cakupan kunjungan ibu hamil K4		100%			100%		
						Cakupan pelayanan nifas		100%			100%		
						Angka Kelangsungan Hidup Bayi		987			988		
						Cakupan kunjungan bayi		96%			96%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100%				100%	
		Cakupan pelayanan anak Balita		100%				100%	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita		10%				9%	
		Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun		3%				3%	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat		100%				100%	
		Percentase Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan		100%				100%	
		Percentase warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
		Percentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100%				100%	
		Cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati (Case Detection Rate/CDR)		95%				95%	
		Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (Case Notification Rate/CNR) per 100.000 penduduk		477				474	
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Treatment Success Rate / TSR)		90%				90%	
		Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100%				100%	
		Jumlah infeksi baru HIV per		<0,18				<0,18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1000 penduduk tidak terinfeksi							
		Cakupan Desa/kelurahan		100%				100%	
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95%				95%	
		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		95%				95%	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun		2				2	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani		100%				100%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%				100%	
		Penderita diare yang ditangani		100%				100%	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1		100%				100%	
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100%				100%	
		Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk (sasaran ibu hamil)		<10				<10	
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta		<3				<3	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
		Prevalensi tekanan darah tinggi		<9,5%				<9,25%	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
		Prevalensi obesitas pada		<4%				<3,5%	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		penduduk umur ≥18 tahun											
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			100%				100%				
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			95%				95%				
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			100%				100%				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1.395 orang	69.256.200	DAU		1.500 orang	50.000.000
1	02	02	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1.331 orang	6.410.500	DAU		1.450 orang	14.577.530
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1.308 orang	11.401.300	DAU		1.410 orang	16.612.530
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	5.540 orang	17.481.600	DAU		5.735 orang	28.000.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sekolah	17.210 orang	16.257.500	DAU		17.000 orang	20.000.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posbindu	83.354 orang	68.927.800	DAU		82.891 orang	69.000.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia, Posbindu	18.343 orang	16.364.200	DAU		18.453 orang	61.419.600
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posbindu	38.095 orang	12.922.800	DAU		39.000 orang	17.779.080

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posbindu	2.742 orang	7.295.700	DAU		3.373 orang	10.943.680
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	490 orang	9.677.800	DAU		148 orang	11.058.080
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Balkesmas	633 orang	38.358.300	DAU		634 orang	40.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	2.758 orang	300.183.300	DAU		3.197 orang	352.476.080
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	7.178.200	DAU		1 dokumen	8.000.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu	1 dokumen	1.379.617.200	DAU		1 dokumen	373.127.370
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	19.147.700	DAU		1 dokumen	70.000.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	39.604.700	DAU		1 dokumen	700.000.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	1 dokumen	27.211.500	DAU		1 dokumen	43.490.600
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	61.765.700	DAU		1 dokumen	54.692.770

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	70.208.600	DAU		1 dokumen	107.545.460
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, BPJS	1 dokumen	12.662.972.660	DAU		1 dokumen	14.993.362.558
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sekolah	100 orang	14.565.000	DAU		100 orang	16.379.000
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	32.071.100	DAU		1 dokumen	46.344.210
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	1 dokumen	46.414.200	DAU		1 dokumen	57.111.120
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	55.495.000	DAU		1 dokumen	69.449.600
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PSC	1 unit	1.434.616.079	DAU		1 unit	1.617.712.069
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	100 orang	31.769.700	DAU		100 orang	95.510.910
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	13 orang	28.948.000	DAU		13 orang	26.496.910

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Dinas Kesehatan, Puskesmas	0 orang	10.485.900	DAU		0 orang	12.788.490
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terselenggara							
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	2.334.000	DAU		1 dokumen	2.334.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku		100%				100%	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	36 unit	19.141.200	DAU		36 unit	24.613.300
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	5 unit	352.479.700	DAU		5 unit	146.878.100
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan, RS	1 dokumen	4.574.000	DAU		1 dokumen	5.556.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)		100%				100%	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	7.434.600	DAU		1 dokumen	9.974.600
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		20				20	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten/Kota								
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	38.698.831	DAU		1 dokumen	49.000.000
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	42.244.800	DAU		1 dokumen	50.924.800
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten		100%				100%	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	60 orang	17.778.000	DAU		60 orang	20.000.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		100%				100%	
						Percentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat laik higiene		100%				100%	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin		40 unit				40 unit	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	Dinas Kesehatan	1 dokumen	17.647.400	DAU		1 dokumen	17.647.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga yang Diterbitkan		60 sertifikat			60 sertifikat		
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	1 dokumen	37.360.300	DAU	1 dokumen	42.810.300	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Percentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diawasi kelayakannya		100%			100%		
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	1 dokumen	20.646.800	DAU	1 dokumen	21.000.000	
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Percentase pelaksanaan pengawasan terhadap jajanan yang beredar		100%			100%		
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Dinas Kesehatan	1 dokumen	20.798.100,00	DAU	1 Dokumen	20.798.100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Percentase sampel produk IRTP yang diperiksa		100%			100%			
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan, Labkesda	30 unit	19.490.000	DAU		40 unit	23.445.000
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase kelurahan siaga aktif strata mandiri		82,35%				88,24%		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kegiatan penyuluhan kesehatan yang melibatkan masyarakat dan lintas sektor		100%			100%		
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	70.006.000	DAU		8 dokumen	286.479.992
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Peserta yang memperoleh penyuluhan gerakan hidup bersih dan sehat		100%			100%		
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 dokumen	19.401.000	DAU		1 dokumen	20.000.000
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM Aktif		229 unit			229 unit		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
					Rasio posyandu per satuan balita		30				30		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan, Posyandu	1 dokumen	23.336.000	DAU	1 dokumen	36.000.000	
SUB UNIT LABORATORIUM KESEHATAN													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Laboratorium Kesehatan	1 paket	836.489.000	DAU	1 paket	900.000.000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Laboratorium Kesehatan	1 dokumen	723.554.100	DAU	1 dokumen	734.000.000	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Laboratorium Kesehatan	1 unit	121.446.800	DAU	1 unit	128.000.000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku		100%			100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Laboratorium Kesehatan	1 unit	86.152.900	DAU		1 unit	97.000.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Percentase sampel produk IRTP yang diperiksa		100%				100%	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		30 unit	132.170.901			30 unit	133.000.000
SUB UNIT INSTALASI FARMASI													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar		100%				100%	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		1 dokumen	28.932.000			1 dokumen	34.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Fasilitas Kesehatan Lainnya								
SUB UNIT PUSKESMAS MAGELANG SELATAN										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%			100%	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%		100%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Magelang Selatan	1 unit	1.750.000.000	BLUD
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Magelang Selatan	1 unit	1.850.000.000	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar			100%		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			100%		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Magelang Selatan	1 dokumen	162.200.000	DAU
SUB UNIT PUSKESMAS JURANGOMBO										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%			100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%			100%		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Jurangombo	1 unit	1.500.000.000	BLUD	1 unit	1.000.000.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%			100%		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%			100%		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jurangombo	1 dokumen	101.375.000	DAU	1 dokumen	120.832.800	
SUB UNIT PUSKESMAS MAGELANG TENGAH													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%			100%		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%			100%		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Magelang Tengah	1 unit	1.805.000.000	BLUD	1 unit	1.905.000.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%			100%		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Persentase ketersediaan		100%			100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	layanan kesehatan untuk UKM dan UKP									
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Magelang Tengah	1 dokumen	162.200.000	DAU	1 dokumen	193.332.480	
SUB UNIT PUSKESMAS KERKOPAN													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%			100%		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%			100%		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kerkopan	1 unit	1.025.000.000		1 unit	1.125.000.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%			100%		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%			100%		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kerkopan	1 dokumen	101.375.000	DAU	1 dokumen	120.832.800	
SUB UNIT PUSKESMAS MAGELANG UTARA													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%				100%	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%				100%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Magelang Utara	1 unit	2.156.592.400	BLUD	1 unit	2.157.593.000
1	02	02		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%				100%	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%				100%
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Magelang Utara	1 dokumen	162.200.000	DAU	1 dokumen	193.331.480
SUB UNIT RSUD BUDI RAHAYU												
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RSUD Budi Rahayu	12 paket	32.420.100	DAU	12 paket	32.420.100
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD Budi Rahayu	12 paket	21.989.800	DAU	12 paket
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD Budi Rahayu	12 laporan	252.999.024	DAU	12 laporan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RSUD Budi Rahayu	8 unit	189.294.700	DAU	8 unit
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Budi Rahayu	1 unit	4.000.000.000	BLUD	1 unit
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1	02	02	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	RSUD Budi Rahayu	100 unit	76.742.000	DAU	100 unit
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	RSUD Budi Rahayu	1 paket	1.131.778.300	DAU	1 paket
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Budi Rahayu	1 dokumen	3.353.536.690	DAU		1 unit	3.353.536.690
SUB UNIT RSUD TIDAR													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%				100%	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD		100%				100%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Tidar	1 unit	245.000.000.000	BLUD		1 unit	210.000.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100%				100%	
1	02	02	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100%				100%	
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD Tidar	1 unit	15.000.000.000				0
					Total				379.706.807.972				